



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2025

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA
BANJIR, BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR, ANGIN SIKLON TROPIS,
CUACA EKSTRIM, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Informasi Peringatan Dini Cuaca dan Iklim oleh BMKG, bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki periode musim hujan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin siklon tropis, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti terancamnya pemukiman masyarakat, rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta rusaknya lahan produksi pertanian masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

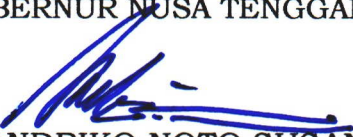
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Juni 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Juni 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2025

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
12. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
14. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati dan Pj. Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	